

**ANALISIS PROSES PENERBITAN *SHIFTING PERMIT*
(SPOG) UNTUK ALUR PELAYARAN SAMARINDA PADA
PT OREMUS BAHARI MANDIRI CABANG SAMARINDA**



AHMAD SUBARKAH

NIT. 20.43.028

**KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR**

TAHUN 2024

SKRIPSI

**ANALISIS PROSES PENERBITAN SHIFTING PERMIT UNTUK ALUR
PELAYARAN SAMARINDA PADA PT. OREMUS BAHARI MANDIRI**

Disusun dan Diajukan oleh:

AHMAD SUBARKAH

NIT. 20.43.28

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal, 10 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ilham Ada, S.SiT., M.M.



Roy Tato Bangun, S.S.T.Pel., M.M.
NIP. 19900103 202321 1 026

Mengetahui:

a.n Direktur

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Pembantu Direktur I

Ketua Program Studi KALK



Capt. Faisal Saransi, M.T., M.Mar.
NIP. 19750329 199903 1 002



Jumriani, SE., M.A.Adm.SDA.
NIP. 19731201 199803 2 008

PRAKATA

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul ” **Analisis Peranan *Shifting Permit* Dalam Alur Pelayaran Samarinda Di PT.Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda ”**

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menjalankan praktek darat di PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Samarinda. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Pada kesempatan ini pula saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Capt. Rudi Santoso, M.Pd selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
2. Bapak Capt. Faisal Saransi, M.T. selaku pembantu direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
3. Ibu Jumriani, S.E., M.Adm, S.D.A selaku Ketua Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
4. Ibu Jumriani, S.E., M.Adm, S.D.A selaku Dosen Pembimbing I yang mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Roy Tato Bangun, S.S.T.Pel., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Samarinda yang telah bersedia menerima penulis untuk belajar dan

melaksanakan penelitian serta mengumpulkan data dalam kaitannya dengan penulisan tugas akhir;

7. Seluruh Taruna/I PIP Makassar dan Angkatan XLI;

8. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini;

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan bila dipandang dari segala sisi. Tentunya dalam hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dan perlu untuk diperhatikan. Dengan kerendahan hati penulis membutuhkan saran dari pembaca, dan harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

AHMAD SUBARKAH, 2023. "Analisis Peranan Shifting Permit dalam Alur Pelayaran Samarinda di PT.Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda" (Dibimbing oleh Jumriani dan Roy Tato).

Shifting permit memainkan peran penting dalam alur pelayaran di Samarinda, khususnya dalam memastikan kelancaran perpindahan kapal di area pelabuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penerbitan shifting permit di PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda, selama penulis melaksanakan praktek darat (PRADA) dari bulan Agustus 2022 hingga bulan Juli 2023. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitian dengan cara observasi, wawancara langsung kepada karyawan PT Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisa deskriptif kualitatif

Proses penerbitan shifting permit di PT. Oremus Bahari Mandiri Site Samarinda melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan persetujuan otoritas pelabuhan. Kendala yang sering dihadapi termasuk kelengkapan dokumen. Shifting permit sangat penting bagi kapal untuk bergerak bebas. Oleh karena itu, shifting permit sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pergerakan kapal di alur pelayaran Samarinda.

Kata Kunci: Peranan, Shifting Permit, Alur Pelayaran

ABSTRACT

AHMAD SUBARKAH, 2023. Analysis of the Role of Shifting Permit in Samarinda Shipping Flow at PT.Oremus Bahari Mandiri Samarinda Branch (Supervised by Mrs. Jumriani and Mr. Roy Tato).

Shifting permits play an important role in the shipping channel in Samarinda, especially in ensuring the smooth movement of ships in the port area. The purpose of this study is to determine the process of issuing shifting permits at PT. Oremus Bahari Mandiri Samarinda Branch, identify the obstacles faced, and the efforts made to overcome these obstacles.

This research was conducted at PT Oremus Bahari Mandiri Samarinda Branch, during the author's land practice (PRADA) from August 2022 to July 2023. The data source obtained is primary data obtained directly from the research site by means of observation, direct interviews with employees of PT Oremus Bahari Mandiri Samarinda Branch. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis technique.

The process of issuing shifting permits at PT Oremus Bahari Mandiri Site Samarinda involves submitting applications, verifying documents, and port authority approval. Obstacles that are often faced include document completeness. Shifting permits are very important for ships to move freely. Therefore, shifting permits are indispensable to ensure the smooth movement of ships in the Samarinda shipping channel.

Keywords: Role, Shifting Permit, Shipping Channel

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
BAB II	3
TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Pengertian Analisis	4
B. Pengertian Shifting Permit	5
C. Dokumen Shifting Permit (ijin gerak)	6
D. Alur Pelayaran	8
E. Kapal	9
F. Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Proses Penerbitan Shifting Permit	11
G. Proses penerbitan shifting permit :	13
H. Kerangka Pikir	14
I. Hipotesis	15

BAB III	16
METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Dan Desain Penelitian	17
B. Definisi Operasional	17
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data	19
BAB IV	19
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Gambaran Umum PT. Oremus Bahari Mandiri	20
B. Persyaratan Penerbitan <i>Shifting Permit</i> (SPOG) di KSOP Kelas 1, Samarinda	23
C. Proses Penerbitan <i>Shifting Permit</i>	25
D. Kendala Dalam Proses Penerbitan <i>Shifting Permit</i>	35
E. Upaya Dalam Proses Penerbitan <i>Shifting Permit</i>	38
F. Peranan <i>Shifting Permit</i> dalam alur Samarinda pada kapal PHM	44
BAB V	50
SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pikir.....	15
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi PT. Oremus Bahari Mandiri	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo PT. OBM	20
Gambar 4.2, Searching Inapornet.....	25
Gambar 4.3 Halaman Masuk Inapornet	26
Gambar 4.4, Halaman Utama Inapornet	26
Gambar 4.5, Halaman utama Inapornet.....	27
Gambar 4.6, Permohonan Online SPOG	27
Gambar 4.7, Permohonan Online SPOG	28
Gambar 4.8, Permohonan Online SPOG	28
Gambar 4.9, Permohonan Online SPOG	29
Gambar 4.10, Permohonan Online SPOG	30
Gambar 4.11, Permohonan Online SPOG	30
Gambar 4.12, SPOG tanpa Pandu	33
Gambar 4.13, SPOG menggunakan Pandu.....	34
Gambar 4. 14, Permohonan yang ditolak akibat PUP RAMBU.....	35
Gambar 4. 15, Permohonan yang ditolak akibat SPK Pandu	
Gambar 4. 16, Permohonan yang ditolak akibat PMK dan <i>Liferaft</i>	36
Gambar 4. 17, Permohonan yang ditolak akibat Surat Laut	36
Gambar 4. 18, Permohonan yang ditolak akibat Wreck Removal.....	
Gambar 4. 19, Permohonan yang ditolak akibat AFS	37
Gambar 4. 20, <i>Jetty</i> PHM	
Gambar 4. 21, <i>Jetty</i> PHM	45
Gambar 4. 22, pos pengantaran <i>Shifting Permit</i>	46
Gambar 4. 23, pos pengantaran <i>Shifting Permit</i>	
Gambar 4. 25, pos pengantaran <i>Shifting Permit</i>	
Gambar 4. 28, WO <i>Shifting Permit</i>	46
Gambar 4. 29, WO <i>Shifting Permit</i>	47
Gambar 4. 30, Pos Pengantaran <i>Jetty</i> Senipah.....	48
Gambar 4. 32, Pos Pengantaran BRAVO 1	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan pulau-pulau. Karena itu, transportasi laut menjadi sangat penting untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh negeri. Salah satu bentuk transportasi laut adalah angkutan laut, yang menggunakan kapal. Kapal berfungsi sebagai kendaraan yang mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang melintasi laut. Perusahaan pelayaran yang menyediakan layanan angkutan laut ini menawarkan jasa untuk penumpang dan pengiriman barang.

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, di mana sebagian besar wilayahnya adalah perairan dan hanya sebagian kecil berupa daratan. Sebagai negara maritim, laut yang mengelilingi pulau-pulau memiliki peran krusial dalam menjaga kesatuan bangsa, menciptakan stabilitas politik, meningkatkan ekonomi, dan mendukung kemakmuran.

Sebagai negara kepulauan, pelayaran di Indonesia merupakan salah satu moda transportasi yang integral dengan sistem transportasi nasional yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masa depan. Moda transportasi ini memiliki daya tarik tersendiri karena kemampuannya untuk mengangkut barang dan penumpang secara massal serta menjangkau seluruh wilayah melalui jalur perairan.

Agar kapal dapat beroperasi dengan baik sesuai harapan, kapal-kapal harus memenuhi kelaikan laut. Ini mencakup kepatuhan terhadap persyaratan dokumen keselamatan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan yang memadai, pemuatan yang tepat,

kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta sistem hukum yang mengatur pelayaran di perairan tujuan.

Menggunakan transportasi laut seperti kapal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah atau negara. Transportasi laut memperlancar roda perekonomian, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional. Selain itu, transportasi laut juga mempererat hubungan antarbangsa, yang diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan fungsi pengawasan di laut dan perairan setempat.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti menuliskan hasil penelitiannya maka peneliti memutuskan untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses penerbitan *shifting permit* pada PT. Oremus Bahari Mandiri Site Samarinda ?
2. Kendala pada saat proses penerbitan *shifting permit* ?
3. Upaya yang dilakukan pada saat penerbitan *shifting permit* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai, Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan *shifting permit* pada PT Oremus Bahari Mandiri Site Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala penerbitan *shifting permit*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pada saat proses penerbitan *shifting permit*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang sangat diinginkan oleh penulis yang dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini dalam menunjang aktifitas perkuliahan maupun lapangan pekerjaan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi Taruna / i Dapat menambah pengetahuan tentang peranan *Shifting Permit* (ijin gerak) kapal pada alur pelayaran Samarinda di PT. Oremus Bahari Mandiri Site Cabang Samarinda.
2. Bagi Instansi / Perusahaan Diharapkan hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan perusahaan sebagai acuan kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses penerbitan dokumen *Shifting Permit* (ijin gerak) kapal dikarenakan *Shifting Permit* sangat berperan pada alur sungai Samarinda.
3. Secara Praktis
 - a) Melatih penulis dalam Menyusun hasil penelitian sesuai dengan pemikiran tentang peranan *Shifting Permit* & surat persetujuan olah gerak (SPOG) kapal.
 - b) Peneliti lebih mudah memahami proses penerbitan surat persetujuan olah gerak atau *Shifting Permit*
4. Secara Teoritis
 - a) Menambah sumber pengetahuan tentang penerbitan surat persetujuan olah gerak (SPOG) kapal.
 - b) Memberikan sumbangan pemikiran di dalam ruang lingkup kepelabuhanan dan khusus nya tentang proses penerbitan surat persetujuan olah gerak (SPOG) kapal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Menurut New Johny Wuss V2 (2014) Analisa atau Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno yang artinya melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti Kembali dan luein yang berarti melepas sehingga jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap juga kedalam Bahasa Inggris menjadi analysis yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi analisis.

Kata Analisa atau analisis digunakan dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu social maupun ilmu alam (Sains). Dalam ilmu Bahasa atau linguistik Analisa di definisikan sebagai suatu kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur Bahasa tersebut secara mendalam. Dalam ilmu social, Analisa di mengerti sebagai upaya dan proses untuk menjelaskan sebuah permasalahan dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam ilmu pasti (SAINS) pengertian dan definisi Analisa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan suatu bahan menjadi senyawa penyusunnya. Dalam ilmu Kimia, Analisa digunakan untuk menentukan komposisi suatu bahan atau zat.

Menurut Spradley (Sugiono, 2015:335) mengatakan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa

secara lebih ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariyah,2014:200)

Nasution dalam Sugiyono (2015:334) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelititannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antara bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

B. Pengertian Shifting Permit

Shifting permit adalah izin atau surat izin yang diperlukan untuk melakukan pemindahan atau pergeseran, terutama dalam konteks regulasi atau administrasi tertentu. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam konstruksi, transportasi, atau bahkan dalam perizinan operasional bisnis.

Secara umum, shifting permit mengizinkan seseorang atau organisasi untuk memindahkan atau memindahkan sesuatu yang mungkin mempengaruhi infrastruktur, lingkungan, atau keselamatan publik. Contoh penggunaan yang umum adalah izin untuk memindahkan bangunan atau fasilitas, izin untuk mengubah rute atau tempat parkir untuk alasan keamanan atau konstruksi, atau izin untuk memindahkan peralatan berat atau bahan yang berpotensi berbahaya.

Penting untuk memperhatikan bahwa persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan shifting permit dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Oleh karena

itu, penting untuk mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku serta memperoleh izin yang sesuai sebelum melakukan aktivitas pemindahan atau pergeseran yang diatur.

C. Dokumen Shifting Permit (ijin gerak)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dokumen *shifting permit* (ijin gerak) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor syahbandar yang digunakan bagi kapal yang akan melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau bergerak dari suatu *jetty* ke *jetty* lainnya yang masih bergerak dalam satu Kawasan atau satu daerah untuk melakukan suatu aktifitas seperti, bongkar/muat barang dan bunker.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam proses penerbitan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan

Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan dari kantor pelayaran atau keagenan kepada kantor kesyahbandaran untuk menerbitkan dokumen *Shifting Permit*.

2. Dokumen Persyaratan

Dokumen Persyaratan adalah dokumen dengan isi yang sangat singkat. Bisa menjadi media komunikasi tertulis seperti surat namun ditulis dengan lebih padat, singkat dan jelas yang berisi tentang permintaan, permohonan, pemberitahuan, perintah arahan ataupun sesuatu hal yang harus dilakukan segera mungkin.

Jenis-Jenis dokumen yang wajib ada seperti berikut :

a) Surat Kebangsaan

1. Surat laut/Pas Besar adalah tanda kebangsaan bagi kapal Indonesia dengan tonnage kotor 500 m³ atau lebih, kapal nelayan dan kapal pesiar tidak termasuk.

2. Surat Ukur adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagian pengukuran mengenai besarnya kapal

b) Sertifikat Solas 1974

1. *Cargo Ship Safety Radio Telegraphy Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan kapal dilengkapi dengan penerima dan pemancar radio dengan syarat tertentu.
2. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan dan menerangkan perlengkapan dan peralatan kapal.
3. *Cargo Ship Safety Construction Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan ruangan kapal beserta bangunan kapal mengangkat muatan menurut jenis kapal yang sesuai standar dan keselamatan kapal.

c) Sertifikat Marpol 1973

1. *Pollution Prevention Certificate* adalah sertifikat yang menerangkan bahwa kapal tersebut tidak menyebabkan pencemaran udara dan polusi dilaut.
2. *Last Port Clearance* adalah surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar setempat dipelabuhan mana kapal singgah

d) Sertifikat Biro Klasifikasi

1. Pemadam api *Certificate*, merupakan sertifikat yang menyatakan kapal telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.
2. *LifeRaft Certificate*, merupakan sertifikat yang menyatakan pelampung penyelamat yang digunakan pada saat gawat darurat.
3. *Hull*, merupakan sertifikat yang menyatakan jenis klasifikasi lambung kapal juga jenis lambung kapal.
4. *Load Line*, merupakan sertifikat yang menyatakan batas

garis muat maksimal dan minimal kapal.

5. *Machinery*, merupakan sertifikat yang menyatakan permesinan kapal.

e) Asuransi Perlindungan Kapal

1. Asuransi pengangkatan rangka kapal adalah sertifikat yang menerangkan bahwa kapal tersebut telah diasuransikan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di laut

D. Alur Pelayaran

Alur pelayaran merujuk pada jalur atau rute yang digunakan oleh kapal-kapal untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lain di perairan tertentu, seperti laut, sungai, dan danau. Alur pelayaran ini biasanya ditentukan berdasarkan pertimbangan navigasi, keselamatan, dan efisiensi perjalanan.

Beberapa poin penting terkait dengan pengertian alur pelayaran adalah:

1. Navigasi: Alur pelayaran harus mempertimbangkan faktor navigasi seperti kedalaman air, kondisi geografis (seperti pulau, karang, atau zona berbahaya lainnya), arus laut, dan cuaca.
2. Peraturan: Alur pelayaran sering diatur oleh otoritas maritim atau pemerintah untuk memastikan keamanan pelayaran. Peraturan ini dapat mencakup pembatasan kecepatan, zona-zona larangan, atau persyaratan khusus lainnya.
3. Pemeliharaan: Alur pelayaran juga memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa jalur tersebut tetap aman dan efisien. Ini bisa mencakup pemantauan kedalaman air, pemetaan ulang alur, atau pemasangan penanda navigasi seperti mercusuar.

4. Efisiensi Perjalanan: Alur pelayaran yang baik dapat meningkatkan efisiensi perjalanan kapal dengan meminimalkan jarak yang ditempuh atau memanfaatkan arus laut yang menguntungkan.
5. Perubahan dan Perkembangan: Alur pelayaran dapat mengalami perubahan seiring waktu, baik karena perubahan geografis, infrastruktur baru, atau pengembangan pelabuhan dan fasilitas maritim lainnya.

Alur pelayaran dapat bervariasi dalam skala dan kompleksitas, mulai dari rute lokal di perairan dalam negeri hingga rute internasional yang melewati berbagai negara. Penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memahami karakteristik alur pelayaran untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan perjalanan laut.

Penting untuk memahami alur pelayaran dengan baik karena hal ini mempengaruhi perencanaan perjalanan laut, navigasi kapal, dan aspek keselamatan pelayaran secara keseluruhan. Peraturan dan standar internasional sering digunakan untuk menentukan alur pelayaran yang aman dan efisien di perairan internasional dan nasional.

E. Kapal

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan

dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Suyono (2005) kapal yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pengertian kapal yaitu alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut muatan diperairan laut dengan menggunakan mesin sebagai alat penggerak.

Dalam Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 4 huruf b dan huruf c, diberikan pengertian dari jenis-jenis kapal. Sebagai berikut :

1. Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar
2. Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain.
3. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir.
4. Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan dipermukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil, hidro foil, hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi criteria tertentu.
5. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air.
6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (accommodation barge) untuk penunjang kegiatan lepas pantai

dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah.

Dari berbagai jenis kapal diatas, yang relevan bagi pengangkutan kapal niaga atau yang dapat digolongkan sebagai kapal penumpang adalah :

1. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik, digunakan untuk mengangkut barang dan kapal penumpang.
2. Kapal yang berdaya dukung dinamis, di gunakan untuk mengangkut penumpang saja.

Bila kapal hendak bergerak atau berlayar maka kapal tersebut harus berada dalam keadaan layak laut. layak laut berarti :

1. Kapal layak untuk menghadapi berbagai resiko dan kejadian secara wajar dalam pelayaran.
2. Kapal layak laut menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan ABK-nya.
3. Kapal tidak mencemari lingkungan.

Kelayakan kapal mensyaratkan :

- b. Bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik
- c. Nahkoda dan ABK yang berpengalaman dan bersertifikat
- d. Perlengkapan, store, dan bunker, serta alat-alat keamanan yang memadai dan memenuhi syarat.
- e. Kapal tidak mencemari lingkungan

F. Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Proses Penerbitan Shifting Permit

Dalam peraturan menteri perhubungan Nomor. PM 36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata cara kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas kepelabuhan menyatakan bahwa syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuannya peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar adalah lembaga yang bertugas melakukan port clearance, yaitu proses pemeriksaan dokumen kapal agar dapat masuk dan keluar dari pelabuhan dengan legal. Mereka berperan sebagai penegak hukum dalam konteks pelabuhan dan pengawas keselamatan pelayaran. Setiap kapal harus memiliki dokumen yang menunjukkan kelaikan laut serta mematuhi persyaratan keselamatan pelayaran yang berlaku (Suyono, 2005).

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Dan dalam pasal 207 ayat (1) syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, pelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas :

1. Mengawasi kelayak lautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah tanah.
5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan kapal.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar (bunker)
9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
14. Memimpin penanggulangan pencemaran lingkungan dan pemadaman kebakaran dipelabuhan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 syahbandar mempunyai kewenangan :

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan.
3. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
4. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan.
5. Melakukan pemeriksaan kapal.
6. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
7. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
8. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
9. Melaksanakan sijiil awak kapal.

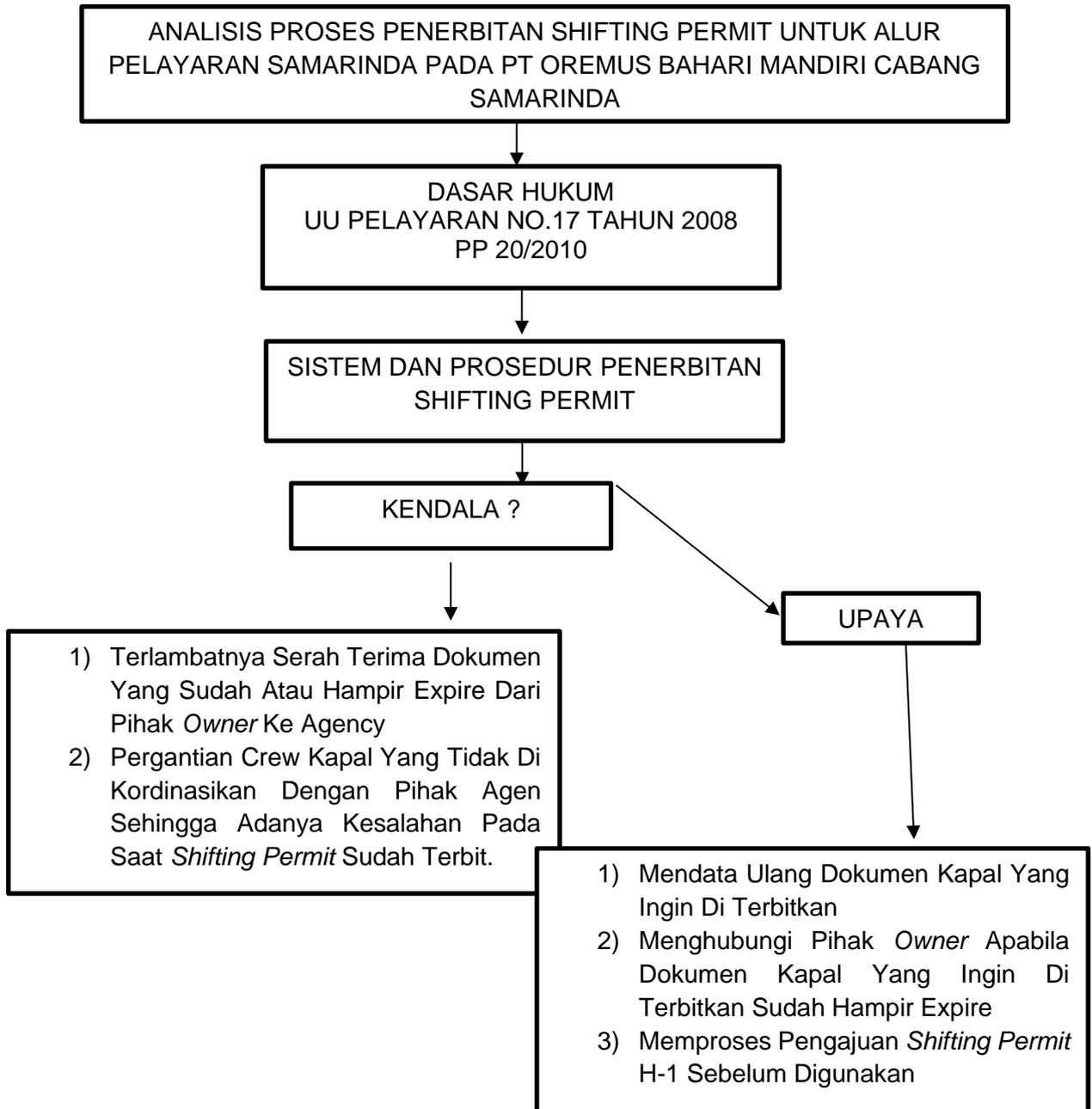
G. Proses penerbitan shifting permit :

1. Membuka Web Inapornet.

2. Memasukkan akun perusahaan pada web inapornet
3. Apabila akun perusahaan sudah masuk maka web inapornet akan menampilkan halaman yang menampilkan berbagai jenis proses dalam kegiatan pelayaran kapal.
4. Setelah tampilan halaman muncul, maka selanjutnya diperlukan untuk mengklik pada tulisan layanan
5. Selanjutnya diperlukan untuk mengklik pada tulisan SPS SPOG
6. Setelah itu, maka proses selanjutnya adalah membuat permohonan *Shifting Permit* atau Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), dapat dilihat pada lampiran halaman nomor 5 diatas tersedia 2 jenis *Shifting permit*, yaitu *Shifting permit* menggunakan pandu dan tidak menggunakan pandu.
7. Mengisi nama kapal agar SPM, RPKRO dan Lokasi akhirnya akan muncul sesuai dengan data kapal pada saat *Clerean In*.
8. Selanjutnya mengisi lokasi awal, nama nahkoda dan keperluan kapal menerbitkan shifting permit.
9. Setelah semua proses selesai, maka tinggal pencet simpan dan kirim.

H. Kerangka Pikir

Tabel 2. 1 Kerangka Pikir



I. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan dan uraian penelitian diatas diduga terdapat kendala dalam proses penerbitan *Shifting Permit* untuk alur pelayaran Samarinda.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan yang didesain sedara Deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kegiatan atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Dalam penelitian ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh deskripsi secara lengkap dan akurat dari berbagai situasi yang sudah dialami penulis di lapangan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variable pada penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui terhadap beberapa kegiatan dalam pelaksanaan *Shifting Permit* sebagai berikut :

1. Crew List

Crew list adalah daftar nama-nama awak kapal yang ada diatas kapal dan dipakai pada saat kapal masuk dipelabuhan yang akan dituju. Untuk dapat diperiksa kelengkapan surat-surat apakah awak kapal yang bekerja sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak syahbandar setempat.

2. PNBP Rambu

PNBP Rambu biasa juga disebut penerimaan negara bukan pajak itu merupakan dokumen yang sangat wajib dilampirkan apabila ingin mengajukan permohonan penerbitan dokumen *Shifting Permit* atau olah gerak kapal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti harus menggunakan metode yang

tepat, juga harus memilih Teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dari jenis penelitian ini. Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Berikut proses pengambilan data dan informasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Primer adalah data yang diambil dari lapangan secara langsung, Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan memahami kejadian secara langsung yang ada di lapangan. Alasan dilakukannya observasi adalah untuk memperoleh gambaran secara realitis sesuai yang didapatkan penulis pada saat di lapangan sesuai tema yang diteliti oleh penulis. Adapun hasil dari observasi yang didapat oleh penulis adalah Peranan *Shifting Permit* pada kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang diageni oleh PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Samarinda

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dan telah diolah oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder dapat melalui pengumpulan data yang tertulis maupun data yang tidak tertulis, sebagai berikut

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh

penulis dengan cara meminta untuk dijadikan arsip atau langsung terjun di lapangan untuk mendapatkan data secara detail dikarenakan bukti bahwa *Shifting Permit* telah di serahkan di kantor Pertamina Hulu Mahakam akan dilaporkan dan dijadikan arsip.

b. Media Sosial

Media sosial merupakan metode yang didapat dengan cara mencari informasi dari internet, seperti mengembangkan pengamatan dari sumber bacaan yang telah didapat di internet. Adapun data yang didapatkan oleh penulis dari informasi media sosial.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat dari observasi, maka digunakan metode analisis deskriptif, kualitatif yaitu menganalisa setiap data yang ditemukan dilapangan dengan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga ditemukan penyebab timbulnya masalah.

Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek yang diteliti, disamping itu juga penulis mencoba untuk memecahkan masalah untuk setiap masalah serta memberikan saran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN